

LAPORAN 2023 KINERJA

BUKA INFORMASI PUBLIK - HAK ANDA UNTUK TAHU



BUKA INFORMASI PUBLIK - HAK ANDA UNTUK TAHU

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatu
Salam Transparansi...

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 dengan tepat waktu. Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat, khususnya dalam melaksanakan fungsi dukungan administratif, keuangan dan tata kelola dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh jajaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih sebesar besarnya kepada civitas Sekretariat Komisi Informasi Pusat atas kerjasama yang telah dilakukan.

Laporan ini diharapkan dapat menyajikan capaian program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan dalam upaya peningkatan/perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Melalui laporan kinerja ini, diharapkan jajaran Sekretariat Komisi Informasi dapat berkinerja secara optimal dan taat azaz dalam mendukung dan menyukseskan program kerja Komisi Informasi Pusat dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



*Wassalamualaikum
Warahmatullah Wabarakatu*



Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Nunik Purwanti



RINGKASAN EKSEKUTIF

Seesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2023. Tahun 2023 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 9 (Sembilan) target kinerja.

Dari 9 (Sembilan) target kinerja yang diperjanjikan dapat disampaikan realisasi sebagai berikut:

- 1). Target dengan capaian diatas 100% sebanyak 4 target.
- 2). Target dengan capaian 100% sebanyak 4 target.
- 3). Target dengan capaian dibawah 100% sebanyak 1 target.

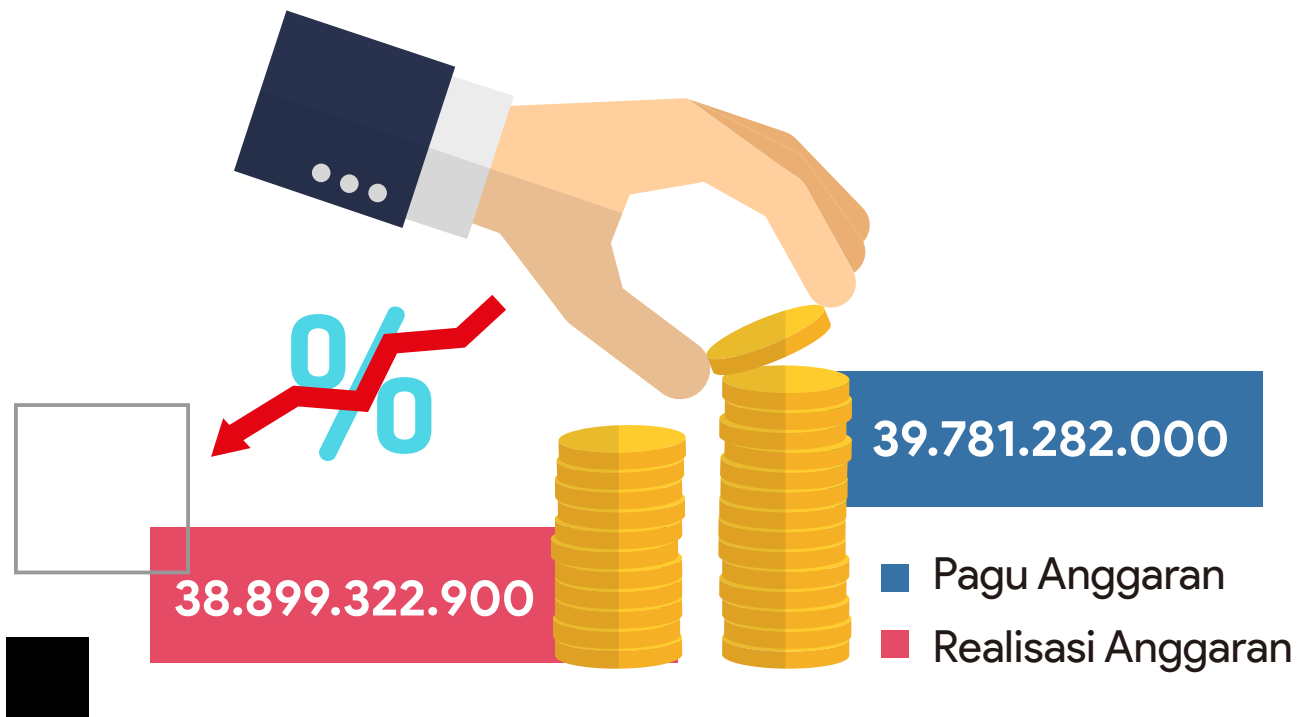
Rincian realisasi dari target masing – masing indikator kinerja sasaran kegiatan pada seluruh indikator kinerja sasaran kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut:



RINGKASAN EKSEKUTIF

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	100 Sengketa	Tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 100 register.	100%
		2. Jumlah Badan Publik yang Informatif	90 Badan Publik	Realisasi untuk tahun 2023 yaitu 139 Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif.	154,4%
		3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73	Nilai IKIP secara nasional tahun 2023 yaitu 75,40	103,2%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP yang Bersih dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP	3,75	Hasil Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP tahun 2023 adalah 3,6771..	97,86
		2. Nilai Kinerja Anggaran KIP	87	Nilai Kinerja Anggaran KIP bulan Desember 91,70	105,4%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	Tidak ada temuan realisasi anggaran Sekretariat KI Pusat berdasarkan hasil pengawasan BPK dan Itjen	100%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP	70%	Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KIP	100%
		5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP	30%	Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KIP	100%
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Komisi Informasi Pusat yaitu 100	125%

RINGKASAN EKSEKUTIF



Realisasi Anggaran Sekretariat KI Pusat Tahun 2023



Pagu anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2023 sebesar Rp. 39.781.282.000 dan Realisasi anggaran Sekretariat Komisi Informasi Pusat per 31 Desember 2023 tercatat sebesar 97,78 atau Rp. 38.899.322.900.



DAFTAR ISI

1	Kata Pengantar Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT-Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 dengan tepat waktu.	Hal 2
2	Ringkasan Eksekutif Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif.	Hal 4
3	BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi C. Susunan Organisasi D. Aspek Strategis E. Sumberdaya Manusia F. Permasalahan dan Tantangan (<i>Strategic Issued</i>)	Hal 8
4	BAB II Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023	Hal 14
5	BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Tahun 2023 B. Realisasi Anggaran	Hal 17
6	BAB IV Penutup Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai target indikator dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat dan capaian tahun-tahun sebelumnya.	Hal 33



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2023



Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat



BAB I PENDAHULUAN →

www.komisiinformasi.go.id

LATAR BELAKANG



Laporan Kinerja merupakan salah satu implementasi dari asas penyelenggaraan *good governance*. Asas akuntabilitas menentukan bahwa setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lahirnya Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam hal dukungan teknis dan administrasi terhadap tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, diperlukan pola pikir terkait dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, manajemen kepegawaian yang handal dan profesional, sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien serta sumberdaya manusia yang kompeten. Terhadap hal tersebut, Sekretariat Komisi Informasi Pusat senantiasa menciptakan sistem dan iklim kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel sehingga menghasilkan kinerja yang mendukung organisasi. Pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Komisi Informasi Pusat berbasis pengukuran kinerja sesuai dengan capaian terhadap indikator kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja.

Kontrak kinerja Sekretaris Komisi Informasi terdiri indikator kinerja yang merupakan program prioritas nasional lembaga yaitu Penyelesaian Sengketa Informasi, Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dan Indeks Keterbukaan Informasi di Badan Publik dan indikator dari pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI



danya kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif dan efisien, membuat Sekretariat Komisi Informasi Pusat melakukan penataan kembali terkait tentang organisasi dan tata kerjanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang diundangkan pada bulan Juli tahun 2022, disebutkan:

01 Kedudukan

- (1). Sekretariat Komisi Informasi Pusat merupakan unsur pendukung administratif, keuangan dan tata kelola yang membantu Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Komisi Informasi Pusat.
- (2). Sekretariat Komisi Informasi Pusat secara fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat serta secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (3). Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

02 Tugas

Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

03 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi yang diantaranya sebagai berikut:

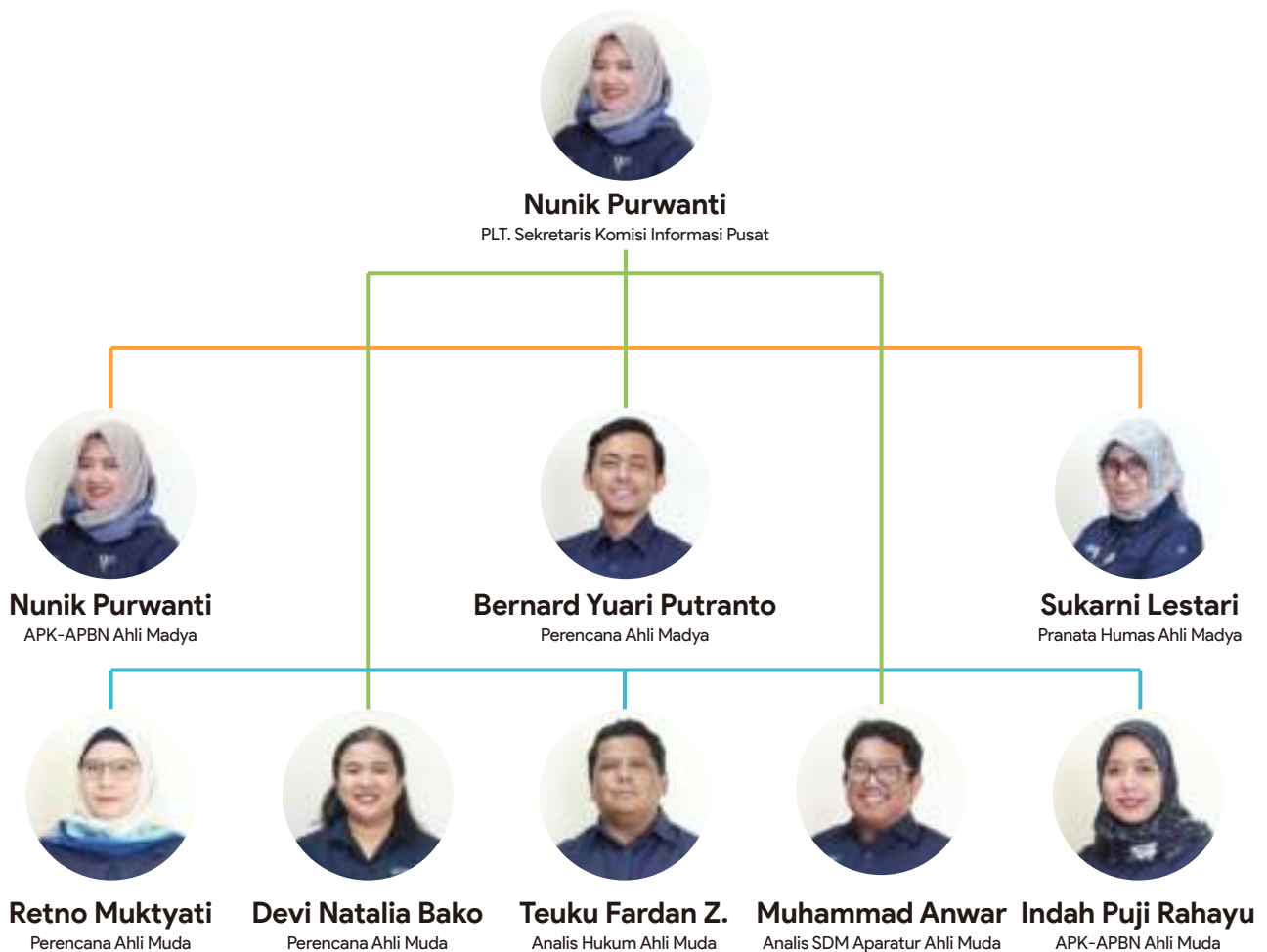
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
- b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan
- d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

SUSUNAN ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja sesuai dengan amanat reformasi birokrasi, Sekretariat Komisi Informasi Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan dibagi dalam beberapa tim kerja, yaitu:

1. Tim Kerja Perencanaan;
2. Tim Kerja Umum;
3. Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi
4. Tim Kerja Komunikasi

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia



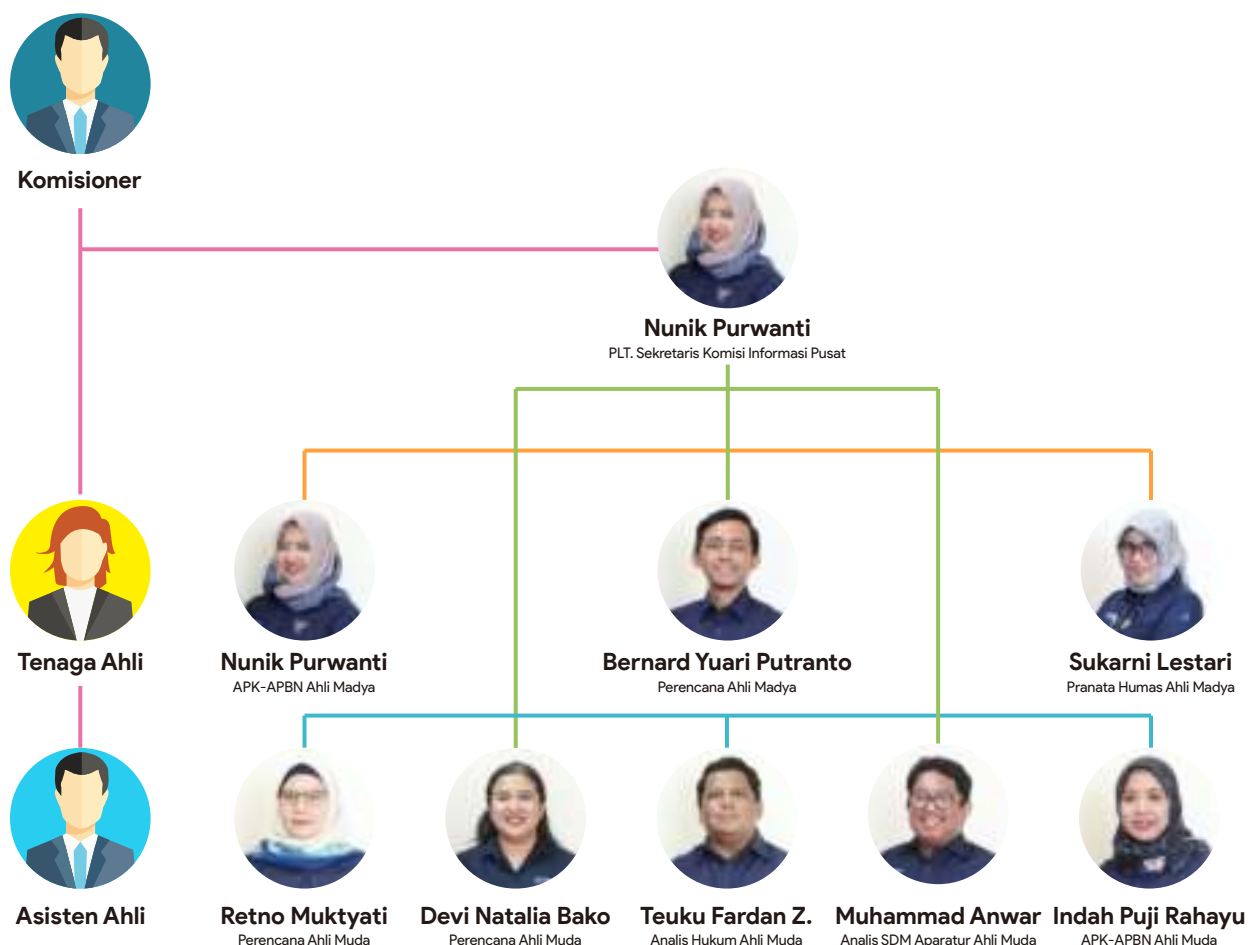
ASPEK STRATEGIS

Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki peran strategis dalam upaya mendukung perwujudan visi dan misi Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat Tahun 2022-2026 diselaraskan dengan tugas, fungsi Komisi Informasi Pusat, yaitu:

1. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program, kegiatan dan anggaran dilingkungan Komisi Informasi Pusat;
2. Pembinaan dan dukungan administrasi di lingkup Komisi Informasi Pusat yang meliputi perencanaan, keuangan, SDM, aset, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta komunikasi (kehumasan).

Selain melakukan peran strategis seperti diatas, Sekretaris Komisi Informasi Pusat juga melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Peran Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam sinergi bersama dengan pimpinan Komisi Informasi Pusat tergambar pada pola hubungan kerja di bawah ini.



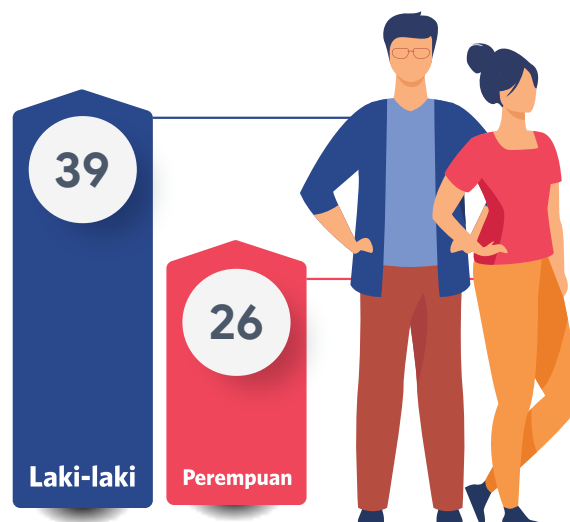
SUMBER DAYA MANUSIA

Tahun 2023 Sekretariat Komisi Informasi Pusat memiliki jumlah sumber daya manusia sebanyak 65 orang. Jumlah pegawai tersebut terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Komposisi Kekuatan SDM Komisi Informasi Pusat Tahun 2023

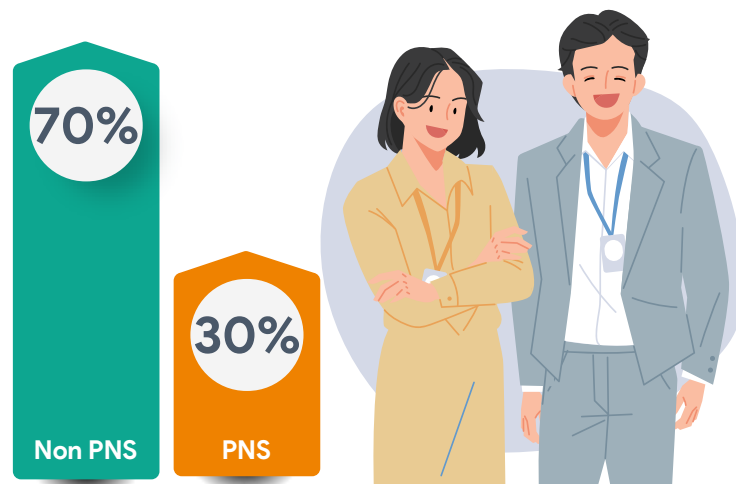


Komposisi Pegawai Sekretariat KIP Berdasarkan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2023



SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Pegawai Sekretariat KIP Berdasarkan PNS & Non PNS Per 31 Desember 2023



PERMASALAHAN DAN TANTANGAN



9 su strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perbaikan organisasi. Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna mendukung program kerja Komisi Informasi Pusat dan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN, terdapat beberapa hal yang saat ini perlu menjadi perhatian yaitu:

1. Penyesuaian terhadap fungsi yang belum masuk ke dalam organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.
2. Penambahan jumlah SDM sesuai kualifikasi dan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat.



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



2023



BAB II PERENCANAAN KINERJA



www.komisiinformasi.go.id

RENCANA STRATEGIS

Komisi Informasi Pusat merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai lembaga mandiri, Komisi Informasi Pusat diwajibkan untuk menyusun perencanaan strategis organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Saat ini Komisi Informasi Pusat telah memiliki rencana strategis periode 2022 s.d 2026 disesuaikan dengan lamanya masa jabatan pimpinan Komisi Informasi Pusat yaitu 4 (empat) tahun.

Dari renstra Komisi Informasi Pusat, terdapat 3 program prioritas nasional yang masuk ke dalam renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini karena anggaran dari Komisi Informasi Pusat menjadi bagian dari DIPA Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari program prioritas tersebut untuk kemudian disampaikan kepada stakeholder terkait (Bappenas dan Kementerian Keuangan).

Dalam mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis di tahun 2024 melalui program prioritas nasional adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023
(2)	(3)	(4)
Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	100 Sengketa
	2. Jumlah Badan Publik yang Informatif	90 Badan Publik
	3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73

PERJANJIAN KINERJA

Dalam mendukung kinerja lembaga, Sekretariat Komisi Informasi Pusat berperan aktif menyukseskan program kerja Komisi Informasi Pusat sesuai dengan target yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja.

Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat berisikan penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika baik yang bersifat substansi dan dukungan manajemen untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target.

PERJANJIAN KINERJA

Melalui Perjanjian Kinerja inilah, kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat tahun 2023:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	100 Sengketa
		2. Jumlah Badan Publik yang Informatif	90 Badan Publik
		3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP yang Bersih dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP	3,75
		2. Nilai Kinerja Anggaran KIP	87
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP	70%
		5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP	30%
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023



Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat tahun 2023, ditetapkanlah RKA per output tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Output	Pagu
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.566.447.000
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	937.125.000
3.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	956.386.000
4.	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	7.018.124.000
5.	Perkara Hukum Lembaga	2.884.613.000
6.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5.418.587.000
TOTAL		39.781.282.000

2023



Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat diukur dari pencapaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 109,5 % yang dihitung dari rata-rata seluruh capaian kinerja sasaran kegiatan.

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	100 Sengketa	Tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 100 register.	100%
		2. Jumlah Badan Publik yang Informatif	90 Badan Publik	Realisasi untuk tahun 2023 yaitu 139 Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif.	154,4%
		3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73	Nilai IKIP secara nasional tahun 2023 yaitu 75,40	103,2%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat KIP yang Bersih dan Efisien	1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP	3,75	Hasil Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP tahun 2023 adalah 3,6771..	97,86
		2. Nilai Kinerja Anggaran KIP	87	Nilai Kinerja Anggaran KIP bulan Desember 91,70	105,4%
		3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	Tidak ada temuan realisasi anggaran Sekretariat KI Pusat berdasarkan hasil pengawasan BPK dan Itjen	100%
		4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP	70%	Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KIP	100%
		5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP	30%	Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KIP	100%
		6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Komisi Informasi Pusat yaitu 100	125%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas, dapat diketahui :

- 1). Target dengan capaian diatas 100% sebanyak 4 target.
- 2). Target dengan capaian 100% sebanyak 4 target.
- 3). Target dengan capaian dibawah 100% sebanyak 1 target.

Analisis Capaian Kinerja



Sasaran Kegiatan 1

Implementasi Undang – Undang
Keterbukaan Informasi Publik



Capaian indikator-indikator sasaran kegiatan Implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan	100 Sengketa	Tahun 2023 telah diselesaikan sebanyak 100 register.	100%
2. Jumlah Badan Publik yang Informatif	90 Badan Publik	Realisasi untuk tahun 2023 yaitu 139 Badan Publik yang masuk kedalam kategori informatif.	154,4%
3. Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73	Nilai IKIP secara nasional tahun 2023 yaitu 75,40	103,2%

Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran kegiatan 1 yaitu:

Jumlah Register Sengketa Informasi Publik yang Diselesaikan

Penyelesaian sengketa informasi merupakan satu dari tiga program prioritas nasional Komisi Informasi Pusat. Permohonan sengketa yang masuk selama tahun 2023 sebanyak 186 register sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Analisis Capaian Kinerja

No.	Bulan	Permohonan Sengketa
1	Januari	8
2	Februari	5
3	Maret	11
4	April	15
5	Mei	19
6	Juni	18
7	Juli	4
8	Agustus	35
9	September	24
10	Oktober	16
11	November	11
12	Desember	20
Total		186

Sumber: Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Analisis Capaian Kinerja

Sengketa informasi yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 100 register, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Penyelesaian Sengketa
1	Januari	23
2	Februari	4
3	Maret	2
4	April	2
5	Mei	2
6	Juni	2
7	Juli	5
8	Agustus	11
9	September	17
10	Oktober	14
11	November	18
12	Desember	0
Total		100

Sumber: Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Dari 100 register sengketa informasi yang diselesaikan, metode atau proses yang digunakan melalui Ajudikasi, Mediasi dan Pencabutan. Pencabutan merupakan hak Pemohon untuk melanjutkan penyelesaian sengketa atau tidak, dan pencabutan dapat diajukan sebelum sidang atau pada saat persidangan. Metode penyelesaian sengketa informasi tergambar pada data dibawah ini:

No.	Metode Penyelesaian	Jumlah
1	Ajudikasi	43
2	Mediasi	49
3	Pencabutan	8
Total		100

Sumber: Tim Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Analisis Capaian Kinerja

Permohonan Berdasarkan jenis Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Jenis Pemohon	Jumlah
1	Individu	57
2	Badan Hukum	129
3	Kelompok Orang	0

Sumber: Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Jumlah permohonan sengketa informasi tahun 2021 – 2023 sebagai berikut:

No	Tahun	Permohonan Sengketa
1	2021	49
2	2022	116
3	2023	186

Sumber: Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2021 – 2023 sebagai berikut:

No	Tahun	Sengketa yang diselesaikan
1	2021	301
2	2022	98
3	2023	100

Sumber: Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Pada Komisi Informasi Pusat

Tahun	Permohonan	Penyelesaian
Sengketa informasi dari tahun 2010 s.d 2021	3026	2944
Sengketa informasi tahun 2022	116	98
Sengketa informasi tahun 2023	186	100
Total	3328	3142
Sisa Sengketa	186	

Sumber: Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi

Analisis Capaian Kinerja

Jumlah Badan Publik yang Mendapat Kategori Informatif

Pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2023 Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian terhadap 368 Badan Publik dengan rincian sebagai berikut:

NO	KATEGORI BADAN PUBLIK	JUMLAH BP	SUBMIT APLIKASI	PRESENTASE
1	Kementerian	34	34	100%
2	Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian	42	41	97,61%
3	Lembaga Non Struktural	33	23	69,69%
4	Pemerintah Provinsi	34	33	97,05%
5	Badan Usaha Milik Negara	67	52	77,61%
6	Perguruan Tinggi Negeri	149	71	47,65%
7	Parai Politik	9	9	100%
Total		368	263	71,46%

Sumber: Bidang Kelembagaan

Berikut ini adalah grafik 368 Badan Publik yang di Monev oleh KI Pusat yang terbagi menjadi 7 kategori:

Jumlah Badan Publik yang di Monev



Sumber: Bidang Kelembagaan

Analisis Capaian Kinerja

Dari total 368 Badan Publik, sebanyak 263 Badan Publik melakukan pendaftaran dan registrasi pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id:

Badan Publik yang melakukan Registrasi



Sumber: Bidang Kelembagaan

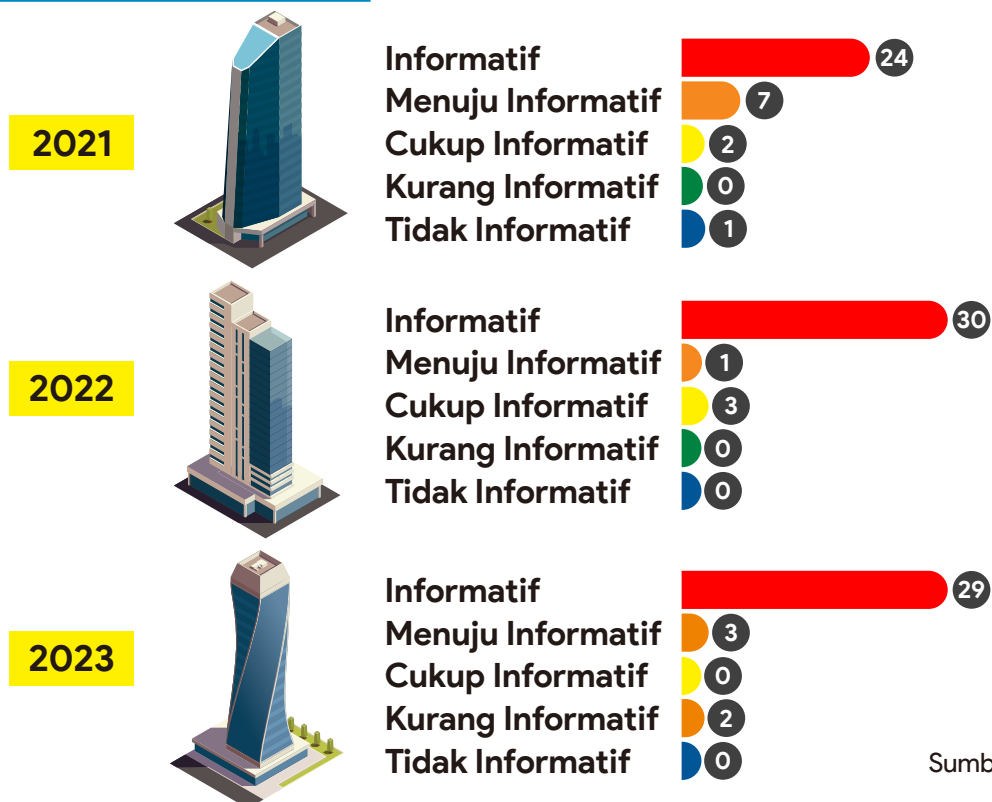
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023 sesuai dengan SK Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 17/KEP/KIP/XII/2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Badan Publik	Kualifikasi					Total	Persen-tase
		Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif		
1	Kementerian	29	3	0	2	0	34	85,3
2	Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	23	8	1	7	3	42	54,8
3	Lembaga Non Struktural	9	2	2	2	18	33	27,3
4	Pemerintah Provinsi	15	6	5	6	2	34	44,1
5	Badan Usaha Milik Negara	26	10	2	3	26	67	38,8
6	Perguruan Tinggi Negeri	34	14	0	7	94	149	22,8
7	Partai Politik	3	0	3	0	3	9	33,3
Total		139	43	13	27	147	368	37,8

Sumber: Bidang Kelembagaan

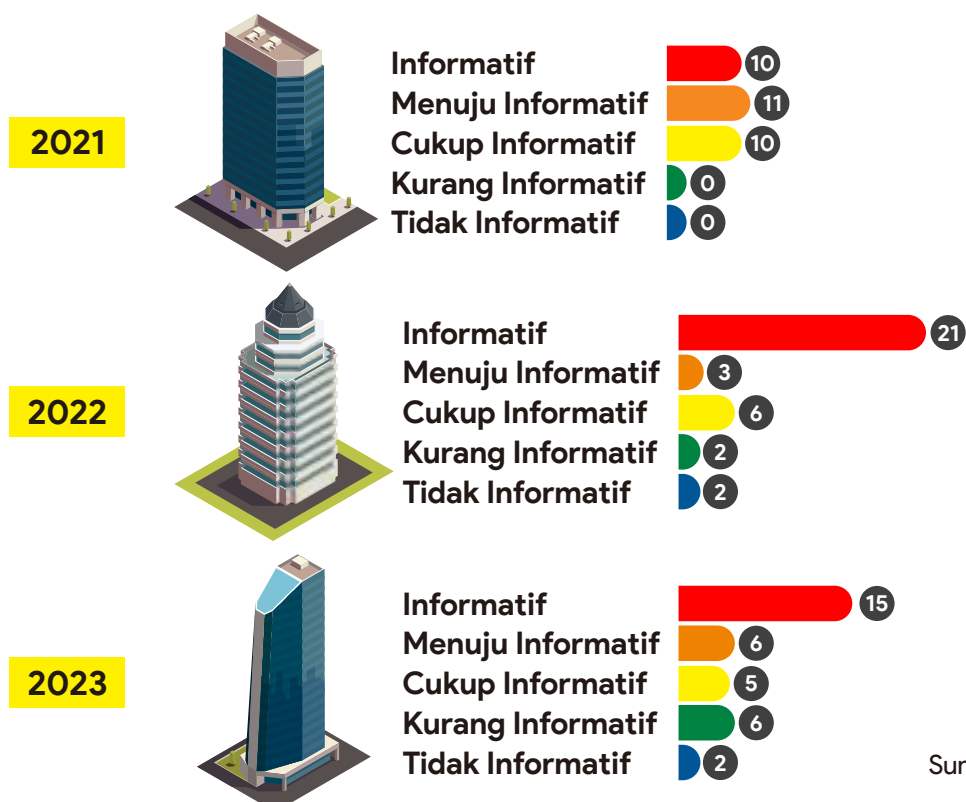
Perbandingan hasil Monitoring dan Evaluasi dalam 3 tahun terakhir (2021 – 2023) dapat dilihat pada grafik berikut:

Kategori Kementerian



Sumber: Bidang Kelembagaan

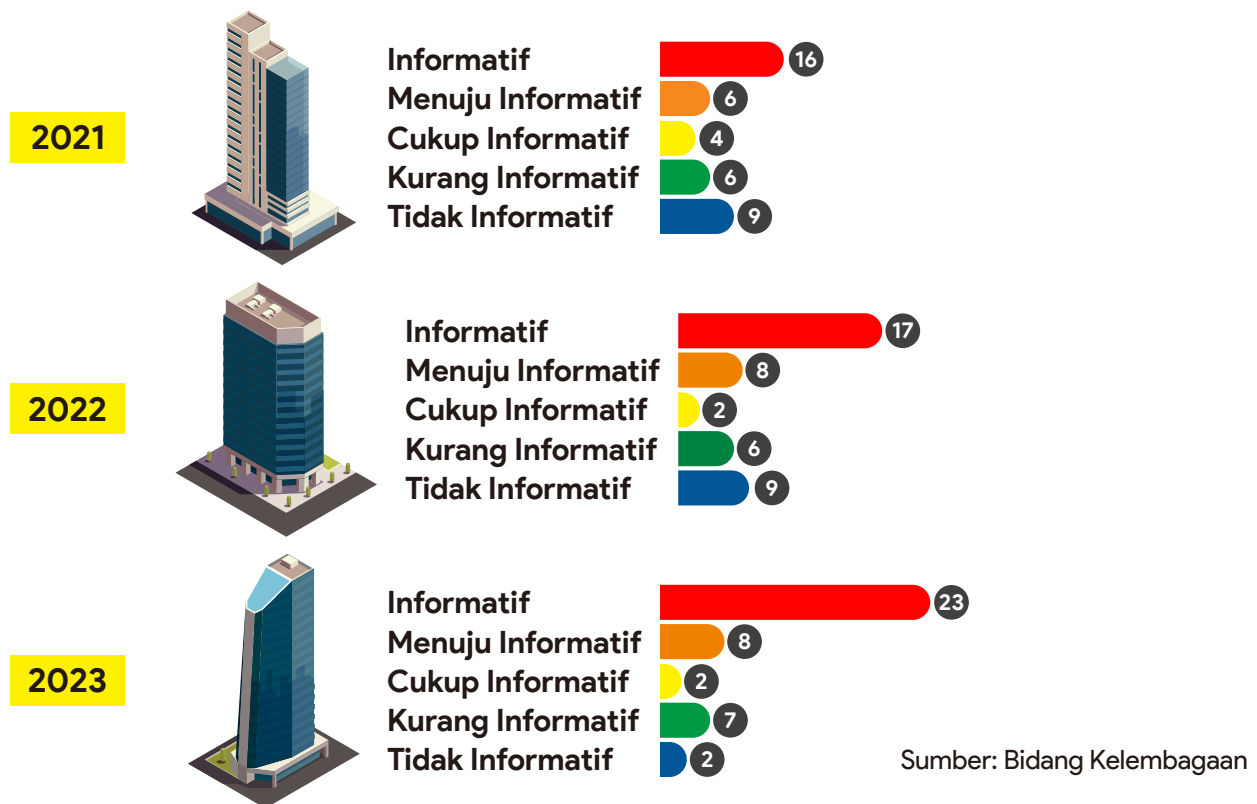
Kategori Pemerintah Provinsi



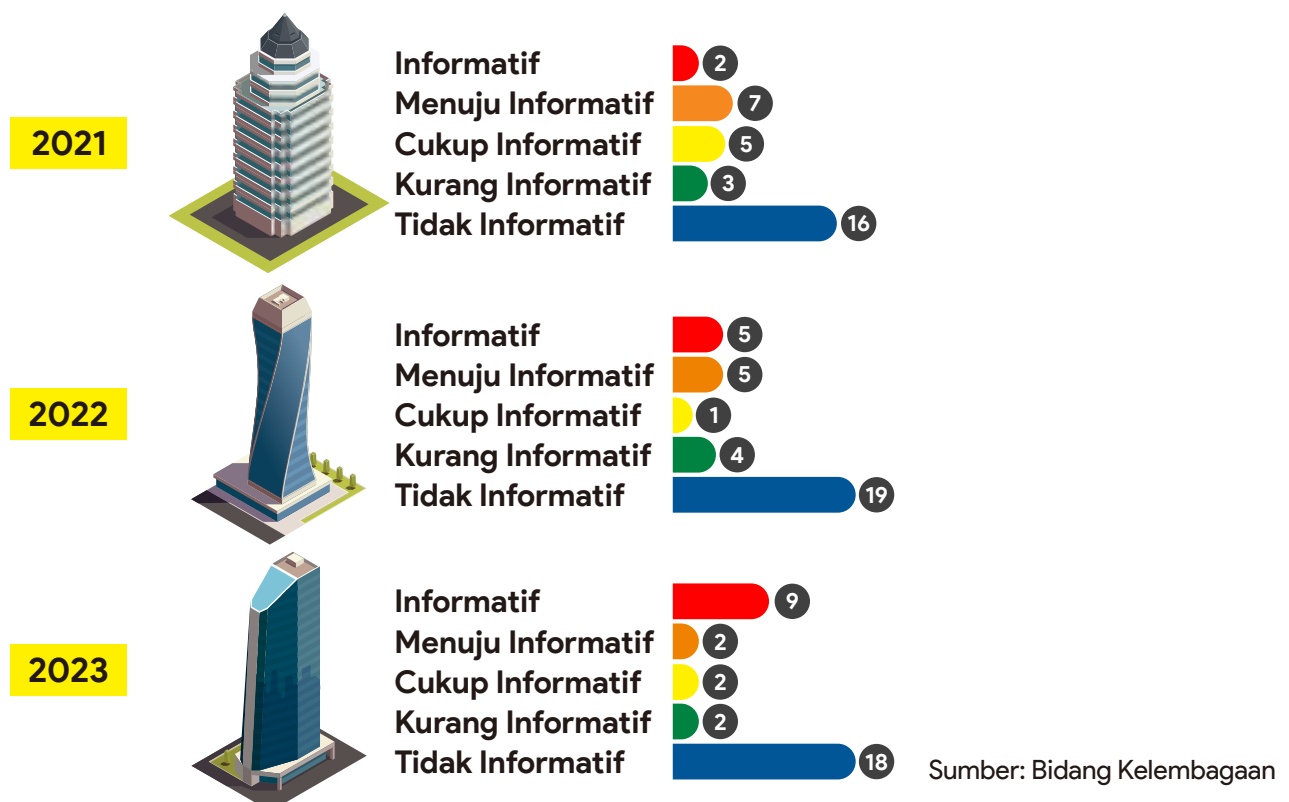
Sumber: Bidang Kelembagaan

Analisis Capaian Kinerja

Kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian

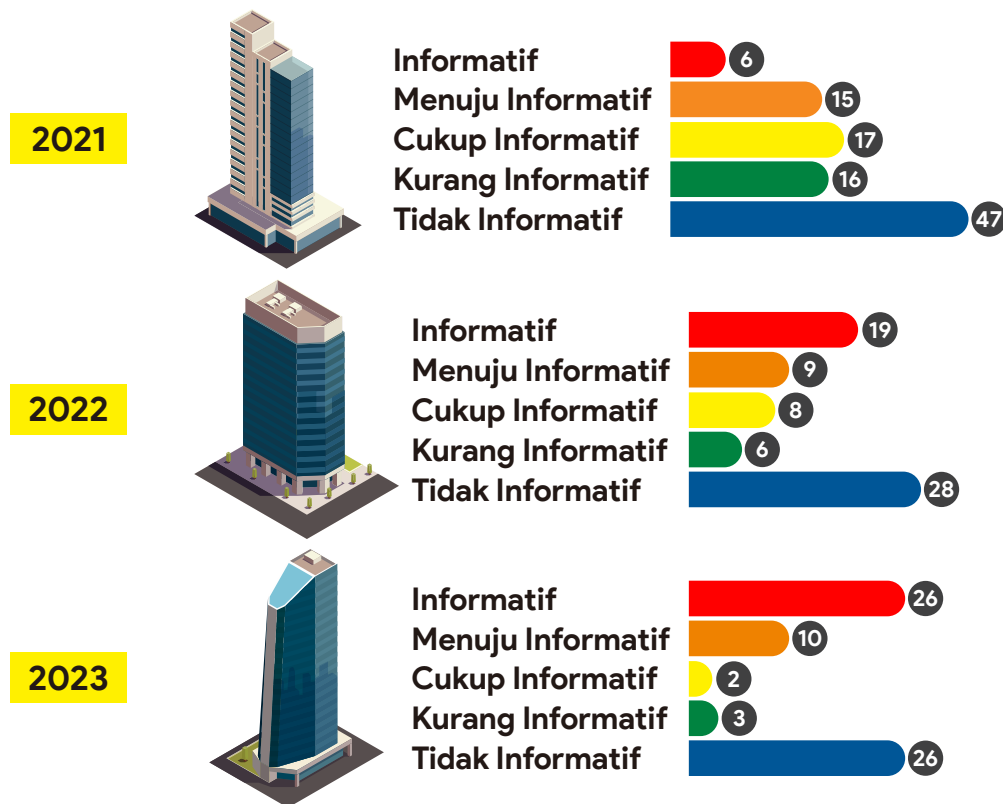


Kategori Lembaga Non Struktural



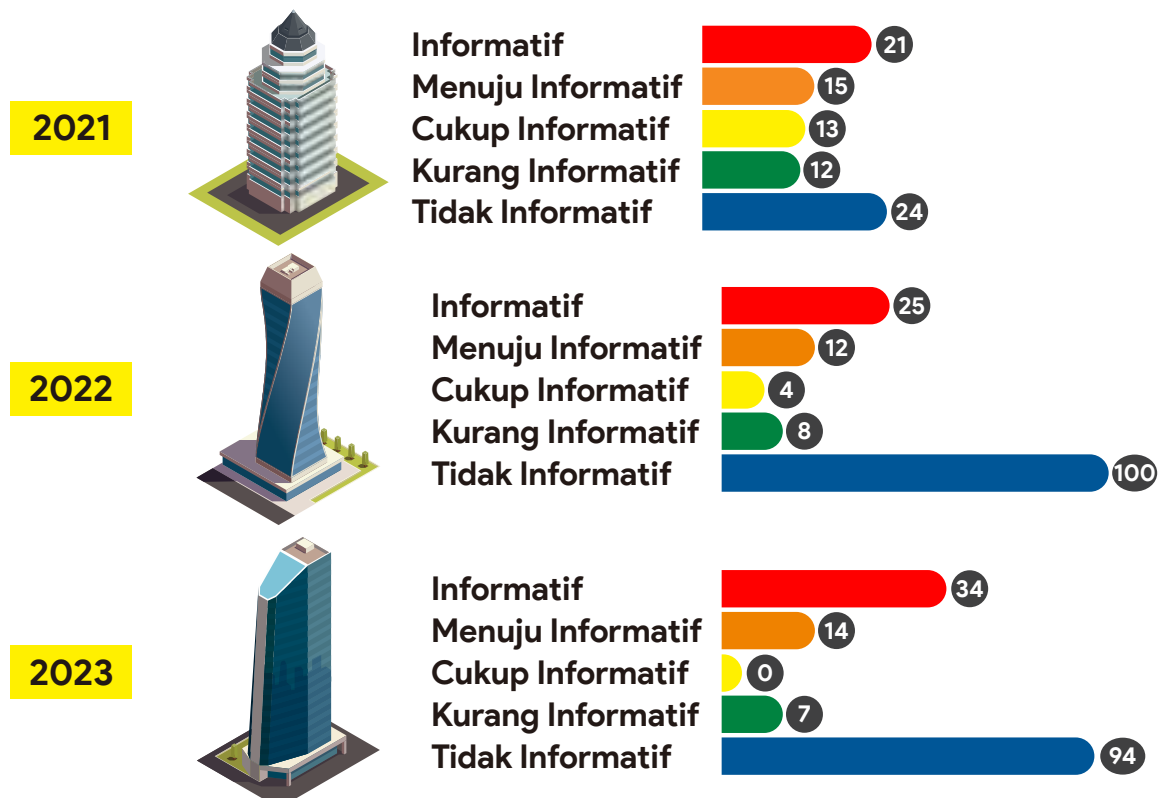
Analisis Capaian Kinerja

Kategori Badan Usaha Milik Negara



Sumber: Bidang Kelembagaan

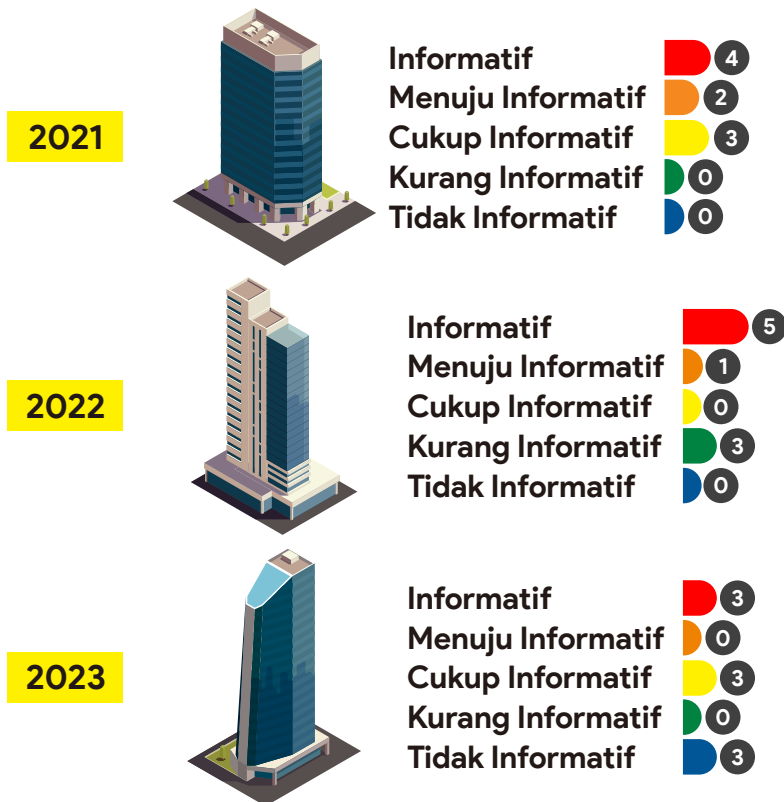
Kategori Perguruan Tinggi Negeri



Sumber: Bidang Kelembagaan

Analisis Capaian Kinerja

Kategori Partai Politik



Sumber: Bidang Kelembagaan

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Program Prioritas Nasional ketiga yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Indeks Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk memotret pelaksanaan keterbukaan informasi pada seluruh provinsi di Indonesia. Tahun 2023 nilai IKIP mencapai 75,40. Adapun 5 daerah dengan nilai tertinggi adalah:

1. Jawa Barat dengan nilai indeks 84.43,
2. Riau dengan nilai indeks 82.43,
3. Bali dengan nilai indeks 81.86,
4. Nusa Tenggara Barat dengan nilai indeks 81.81, dan
5. Aceh dengan nilai indeks 81.27.

Sedangkan 5 (lima) provinsi dengan nilai terendah yaitu:

1. Gorontalo dengan nilai indeks 67.65
2. Papua dengan nilai indeks 67.52
3. Maluku Utara dengan nilai indeks 67.13
4. Papua Barat dengan nilai indeks 64.36, dan
5. Maluku dengan nilai indeks 60.29.

Analisis Capaian Kinerja

Dan beberapa provinsi berada di kategori sedang dengan dengan nilai berkisar antara 60 – 79.

Selain itu sebanyak 24 provinsi tercatat mengalami peningkatan skor dibanding IKIP 2022 dan sisanya mengalami penurunan skor. Beberapa faktor yang membuat penurunan skor adalah terjadinya penurunan anggaran dari pemerintah provinsi, tidak terdapat aturan atau regulasi baru yang diterbitkan pada 2022 serta pergeseran cara pandang informan ahli dalam memberi penilaian dikarenakan tidak tersedianya fakta dan data yang lengkap oleh kelompok kerja.



Sumber: Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Tahun 2023

No.	Indeks	Nilai Skor	Bobot	Skor Indeks	Skor IKIP
1	Skor Indeks Nasional	77,95	70%	54,57	75,40
2	Skor NAC	69,45	30%	20,84	

Sumber: Bidang Penelitian dan Dokumentasi



Sumber: Bidang Penelitian dan Dokumentasi

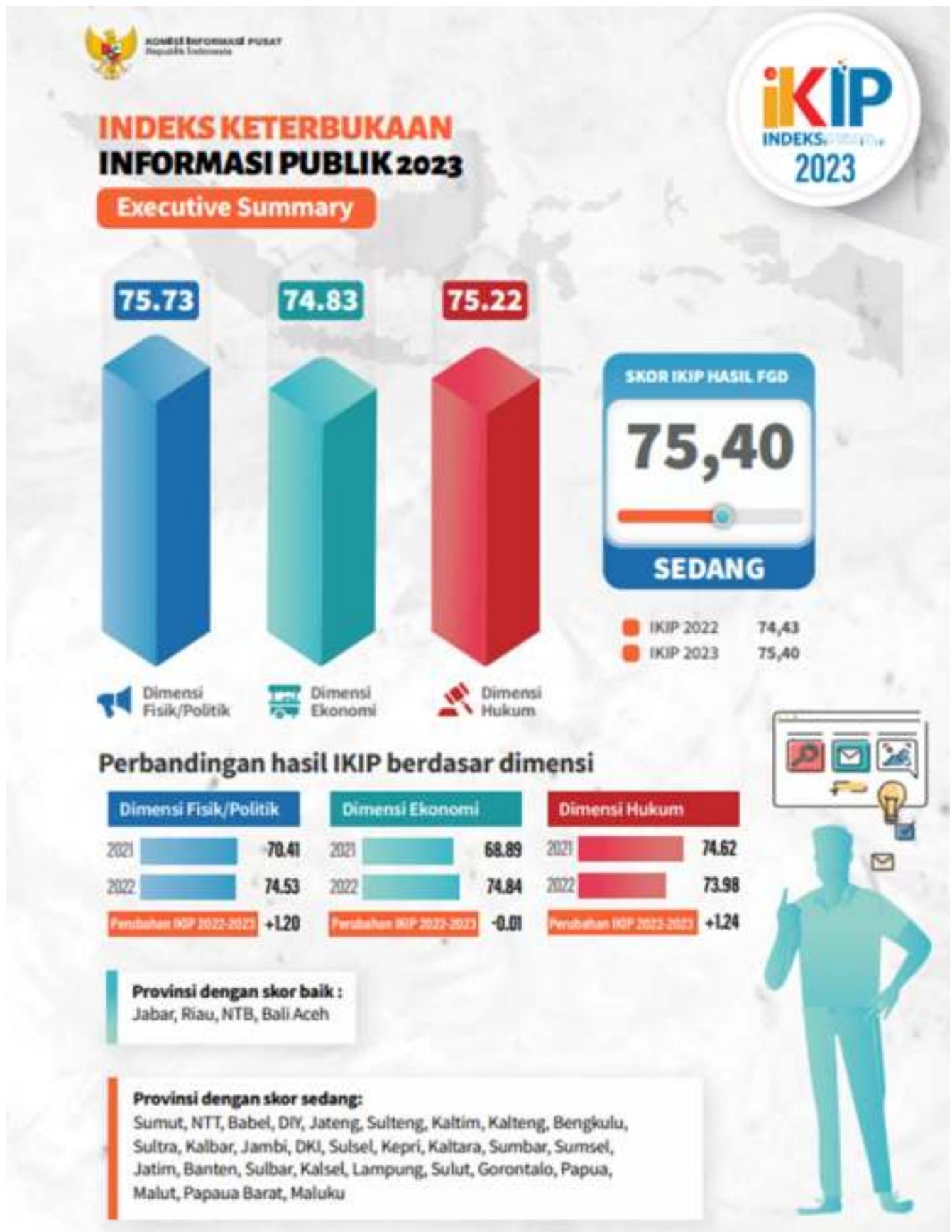
Analisis Capaian Kinerja

Tabel Capaian IKIP 2023 di 34 Provinsi Berdasarkan Dimensi

Provinsi	Dimensi Fisik/Politik			Dimensi Ekonomi			Dimensi Hukum			HASIL IKIP		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
JABAR	78.17	87.5	85.78	76.57	89.01	86.33	80.53	79.43	81.31	78.56	83.42	▲ 84.43
RIAU	71.82	80.24	83.15	71.65	79	84.87	77.4	73.11	79.21	73.45	76.37	▲ 82.43
BALI	82.41	85.69	82.16	82.03	87.36	81.84	85.13	79.09	81.3	83.15	82.15	▼ 81.86
NTB	76.04	84.12	82.66	75.3	85.69	81.95	82.78	80.47	80.26	77.9	81.36	▲ 81.81
ACEH	78.72	81.85	81.93	77.27	84.39	80.48	82.32	78.68	81.64	79.51	80.09	▲ 81.27
SUMUT	69.46	72.75	80.51	65.86	74.28	81.23	70.33	73.53	77.03	69.02	72.33	▲ 79.67
NTT	76.17	75.42	80.76	74.55	73.05	79.91	80.35	74.44	77.51	77.1	73.39	▲ 79.62
BABEL	75.31	75.62	81.72	75.2	74.07	80.27	79.43	73.84	77.15	76.51	74.26	▲ 79.36
DIY	74.46	76.01	78.7	75.18	76.03	79.3	81.16	73.49	78.21	76.59	74.01	▲ 78.47
JATENG	72.76	75.64	77.94	70.41	76.46	76.46	76.65	72.87	79.68	73.46	74.26	▲ 78.27
SULTENG	53.76	73.67	78.1	52.16	73.24	78.44	61.39	73.1	76.79	55.72	72.48	▲ 78.11
KALTIM	75.66	80.18	79.36	74.65	81.52	77.49	80.69	76.12	77.13	76.96	77.58	▲ 77.9
KALTENG	63.86	80.7	77.5	62.34	82.46	78.73	69.06	77.5	79.47	65.11	78.4	▼ 77.87
BENGKULU	71.53	83.03	77.29	65.87	82.54	78.04	70.72	77.72	76.44	70.19	79.77	▼ 77.42
SULTRA	77.84	80.73	78.33	77.16	83.12	77.93	78.94	75.99	75.61	78.04	78.18	▼ 77.19
KALBAR	79.59	79.03	77.3	77.72	79.64	75.6	83.46	77.16	76.03	80.38	76.96	▼ 76.78
JAMBI	71.08	74.25	78.77	68.26	73.48	76.06	75.57	73.93	75.23	71.87	72.83	▲ 76.7
DKI	69.37	80.34	76.87	67	80.42	76.16	73.82	74.27	77.12	70.23	77.25	▼ 76.67
SULSEL	66.54	69.52	77.6	67.17	69.13	73.77	72.5	68.63	77.79	68.43	68.72	▲ 76.64
KEPRI	74.72	75.15	77.07	70.73	71.24	76.49	78.77	74.25	76.18	75.15	73.32	▲ 76.36
KALTARA	69.72	76.43	77.44	67.54	75.08	74.73	71.54	72	74.68	69.84	73.65	▲ 76.06
SUMBAR	68.96	76.74	74.92	67.25	77.02	74.92	75.59	74.47	73.99	70.6	74.47	▲ 74.58
SUMSEL	69.63	69.27	74.31	68.44	70.52	73.08	75.41	70.32	74.64	71.54	69.07	▲ 74.2
JATIM	67.22	75.49	73.64	64.99	75.87	73.56	67.33	69.85	74.12	66.82	73.13	▲ 73.89
BANTEN	77.54	76.6	72.01	75.06	77.86	71.87	79.44	73.27	75.09	77.63	74.48	▼ 73.13
SULBAR	69.32	69.04	72.1	67.71	70.64	67.97	77.34	76.06	74.23	71.39	70.06	▲ 72.36
KALSEL	67.66	68.17	72.65	65.8	71.04	70.94	71.09	71.78	72.97	68.32	68.93	▲ 72.27
LAMPUNG	68	67.9	72.11	66.83	68.04	68.58	74.83	68.49	73.79	69.81	67.52	▲ 71.92
SULUT	66.48	77.02	67.68	65.67	76.92	67.45	69.8	74.54	72.98	67.31	75.03	▼ 70.21
GORONTALO	66.39	80.44	68.42	62.61	77	65.35	64.92	77.07	68.14	65.22	77.24	▼ 67.65
PAPUA	64.83	57.02	68.7	65.75	60.98	66.68	71.33	61.94	65.25	66.94	60.26	▲ 67.52
MALUT	62.58	53.4	67.3	61.38	49.87	66.32	65.4	50.72	69.01	63.19	54.81	▲ 67.13
PAPUA BARAT	44.48	60.7	64.43	41.62	58.38	62.87	56.44	68.13	62.64	47.48	61.49	▲ 64.36
MALUKU	67.15	75.95	54.08	67.71	79.56	55.97	72.82	75.01	64.7	68.95	75.61	▼ 60.29
INDONESIA	71.55	75.2	78.29	70.24	75.46	77.4	75.86	73.28	77.72	71.37	74.43	▲ 75.4

Sumber: Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Analisis Capaian Kinerja



Sumber: Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Analisis Capaian Kinerja

Perbandingan Nilai IKIP 2021 s/d 2024

Tahun	Target pada PK	Realisasi	Capaian
2021	35	71,37	203%
2022	72	74,43	103,3%
2023	73	75,40	103,2%

Sumber: Bidang Penelitian dan Dokumentasi



Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Kualitas Tata kelola
Sekretariat Komisi Informasi
Pusat yang Bersih dan Efisien



Capaian indikator-indikator sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang Bersih dan Efisien adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP	3,75	Hasil Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat KIP tahun 2023 adalah 3,6771. Nilai tahun ini mengalami penurunan dari nilai pada tahun 2022. Hal ini karena adanya tim kerja baru dengan tugas dan fungsi yang juga baru di lingkup Sekretariat KIP yang mendapat nilai rendah. Tetapi nilai tahun 2023 masih dalam kategori A.	97,86
2. Nilai Kinerja Anggaran KIP	87	Nilai Kinerja Anggaran KIP tahun 2023 sebesar 91,70	105,4%
3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Sekretariat KIP berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen	1%	Tidak ada temuan realisasi anggaran Sekretariat KI Pusat berdasarkan hasil pengawasan BPK dan Itjen	100%
4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Sekretariat KIP	70%	Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan di Sekretariat KIP	100%
5. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat KIP	30%	Dikarenakan tidak ada temuan maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya di Sekretariat KIP	100%
6. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Komisi Informasi Pusat yaitu 100	125%

Sesuai sasaran kegiatan kedua pada perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun 2023, terdapat 6 (enam) indikator kinerja kegiatan yang capaiannya sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja sekretariat perihal layanan terhadap Komisioner, dilakukan survei kepuasan Komisioner terhadap layanan sekretariat di Komisi Informasi Pusat. Hal ini merupakan salah satu metode untuk memberi penilaian terhadap sebuah sistem pengelolaan terhadap dukungan administrasi yang diamanahkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Permen Kominfo Nomor 9 Tahun 2022 dalam hal kinerja Tim Kerja Umum, Tim Kerja Perencanaan, dan Tim Kerja Hukum dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta Tim Kerja Komunikasi.

Analisis Capaian Kinerja

Pelaksanaan survei kepuasan Komisioner terhadap layanan sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan melalui tahap sebagai berikut:

1. Penyusunan Instrumen ini dilaksanakan pada bulan Oktober dengan melibatkan stakeholder pada sekretariat Komisi Informasi Pusat dan juga menghadirkan Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Dosen Universitas Indonesia untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai metode survei;
2. Pengisian Kuesioner Penyampaian kuesioner survei kepuasan Komisioner terhadap layanan sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan pada bulan November kepada 7 (tujuh) responden yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat;
3. Tabulasi dan Laporan Survei Proses terakhir adalah tabulasi dan penyusunan laporan survei dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Komisioner terhadap Layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat menunjukkan hasil sebagai berikut :

Indikator	Jumlah Pernyataan	Presentase	Nilai Akhir
Reliabilitas	12	20%	0,76
Responsiveness	15	20%	1,03
Assurance	8	20%	0,53
Emphathy	3	20%	0,22
Tangible	17	20%	1,14
55		100%	3,68

Sumber: Tim Kerja Umum

Hasil rekapitulasi dari data Survei Kepuasan Komisioner terhadap layanan Sekretariat di Komisi Informasi Pusat, kemudian oleh tim dihitung average atau rata-ratanya untuk mendapatkan nilai predikat. Dari total yang ada, rata-rata yang didapatkan yaitu 91,93 dengan nilai predikat A.

Perbandingan Nilai Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat KI Pusat Tahun 2021 – 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Hasil Indeks Kepuasan Layanan
1	2021	97,57 (A)
2	2022	97,63 (A)
3	2023	91,93 (A)

Sumber: Tim Kerja Umum

Analisis Capaian Kinerja

Nilai kepuasan layanan Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Hal ini karena adanya tim kerja baru yang mendapat nilai kurang.

Indeks Kinerja Anggaran KIP

Nilai Indikator Kinerja Anggaran Komisi Informasi Pusat tahun 2023 adalah 91,70, terjadi kenaikan nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2022. Nilai yang dihasilkan pada tahun 2023 terdiri dari komposisi 40% nilai IKPA dan 60% nilai dari aplikasi SMART.

Berikut adalah perbandingan nilai kinerja anggaran KIP selama tahun 2021 – 2023:

No	Tahun	Nilai IKA
2	2021	92,91
3	2022	91,1
4	2023	91,70

Sumber: Tim Kerja Umum

Tahun 2023 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Ketiga Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Satker Pagu Kecil (< 100 Milyar Rupiah). Hal ini merupakan capaian kinerja yang baik bagi Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam pengelolaan anggaran.



Analisis Capaian Kinerja



Piagam Penghargaan

Peringkat Ketiga Nilai Capaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori
Satker Pagu Kecil (< 100 Milyar Rupiah)



**Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran
Sekretariat KI Pusat Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK dan Itjen**

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Itjen terhadap Sekretariat Komisi Informasi Pusat tahun anggaran 2023 adalah “tidak ada temuan dalam pengelolaan keuangan di Komisi Informasi Pusat”. Selama tahun 2020 – 2023 tidak pernah ada temuan dalam pengelolaan keuangan di KI Pusat.

**Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
pada Tahun Berjalan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat**

Dikarenakan tidak adanya temuan dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat maka tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun berjalan.

Analisis Capaian Kinerja

Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Tahun Sebelumnya di Sekretariat Komisi Informasi Pusat

Tidak ada tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada temuan pada tahun sebelumnya di Sekretariat KI Pusat.



Realisasi Anggaran

Tahun 2023 Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp. 39.781.282.000,-. Dari jumlah tersebut realisasi serapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai sebesar Rp. 38.899.322.900,- atau 97,78 %, dengan rincian seperti tabel berikut:

No.	Output	Pagu	Realisasi	Persentase (%)
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22.566.447.000	21.871.606.481	96,92
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	937.125.000	933.768.000	99,64
3.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	956.386.000	949.704.713	99,30
4.	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	7.018.124.000	7.007.296.345	99,85
5.	Perkara Hukum Lembaga	2.884.613.000	2.829.493.110	98,09
6.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	5.418.587.000	5.307.454.341	97,95
TOTAL		39.781.282.000	38.899.322.900	97,78

Sumber: Tim Kerja Umum

2023



Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat



BAB IV **PENUTUP**



Penutup



Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai target indikator dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Komisi Informasi Pusat dan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Dari hasil capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

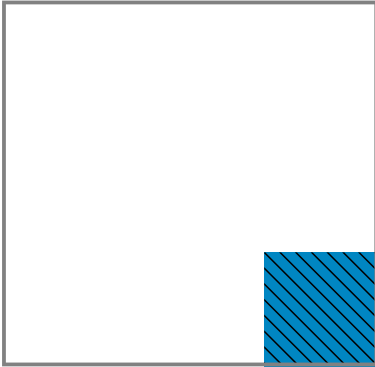
1. Capaian kinerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat pada tahun 2023 secara umum telah mencapai target, bahkan capaiannya melebihi target. Indikator Kepuasan Layanan Administrasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat tidak mencapai target tetapi masih berada di kategori A. Hal ini karena adanya tim kerja baru yang mendapat nilai kurang.
2. Tahun 2023, Sekretariat Komisi Informasi Pusat mendapat penghargaan sebagai Peringkat Ketiga Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kategori Satker Pagu Kecil (< 100 Milyar Rupiah). Hal ini merupakan prestasi kerja bagi Sekretariat Komisi Informasi Pusat dalam pengelolaan anggaran.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2023, Sekretariat Komisi Informasi Pusat menetapkan langkah kerja kedepan untuk mengoptimalkan kinerja sebagai berikut:

1. Melakukan penataan organisasi dengan menambahkan fungsi yang ada/memperkaya fungsi.
2. Melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

LAPORAN KINERJA

Sekretariat
Komisi Informasi Pusat
2023



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

Laporan ini diharapkan dapat menyajikan capaian program dan kegiatan sekaligus sebagai bahan dalam upaya peningkatan/perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Melalui laporan kinerja ini, diharapkan jajaran Sekretariat Komisi Informasi dapat berkinerja secara optimal dan taat azaz dalam mendukung dan menyukseskan program kerja Komisi Informasi Pusat dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Alamat

Wisma BSG Lantai 9, Jalan Abdul
Muis No. 40, Gambir, RT.1/RW.8,
Petojo Selatan, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10160



Kontak

(021) 34830741
sekretariat@komisiinformasi.go.id
www.komisiinformasi.go.id